

ABSTRAK: - Bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam tata kelola pemerintahan yang baik, dan merugikan keuangan negara/ daerah untuk mewujudkannya diperlukan kebijakan anti korupsi sebagai pedoman dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pengaturan mengenai kebijakan anti korupsi;

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019;

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan, Jenis Korupsi, Komitmen Kepala Perangkat Daerah, Implementasi Kebijakan Anti Korupsi.

CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.

- 12 Halaman.